



2025

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH





BUPATI GRESIK

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia – Nya, sehingga kami telah menyelesaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Timur. Laporan ini dibuat untuk memenuhi amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Tahun 2025 mengalami perubahan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 2026 Nomor: 100.2.7/989/OTDA Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dalam rangka melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik selama satu tahun anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Laporan ini memuat informasi tentang capaian indikator kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya, serta ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah. Dengan demikian, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 diperoleh dari data mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Namun kami menyadari bahwa ringkasan laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari penyajian maupun substansi materi yang disajikan, karena belum seluruh tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilaksanakan secara optimal. Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini dibuat, terima kasih kepada semua pihak dan seluruh dukungan data dari Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan laporan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak untuk diketahui masyarakat seluas-luasnya dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di masa yang akan datang.

Gresik, 17 Maret 2026

BUPATI GRESIK



Fandi Akhmad Yani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I	1
1. Capaian Kinerja Makro	1
1.1 Capaian Kinerja Makro.....	2
1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2
1.3 Tingkat Kemiskinan	3
1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	3
1.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	3
1.6 Pendapatan Per Kapita	4
1.7 Ketimpangan Pendapatan	4
BAB II Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Layanan Dasar	5
1. Urusan Pendidikan	5
A. Capaian Kinerja <i>Outcome</i>	5
B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan.....	5
C. Permasalahan dan Solusi	9
2. Urusan Kesehatan	11
A. Capaian Kinerja <i>Outcome</i>	11
B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan	12
C. Permasalahan	14
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	20
A. Capaian Kinerja <i>Outcome</i>	20
B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21
C. Permasalahan dan Solusi	24
4. Urusan Perumahan Rakyat	26
A. Capaian Kinerja <i>Outcome</i>	26

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat.....	26
C. Permasalahan dan Solusi	27
5. Urusan Trantibumlinmas.....	28
A. Capaian Kinerja <i>Outcome</i>	28
B. Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas	29
C. Permasalahan dan Solusi	35
6. Urusan Sosial	38
A. Capaian Kinerja <i>Outcome</i>	38
B. Realisasi Belanja Urusan Sosial	39
C. Permasalahan dan Solusi	40
BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.....	42
A. HASIL EPPD Tahun Sebelumnya	42
B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya ...	42
BAB IV RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH	45
BAB V INOVASI DAERAH	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. 1 Capaian Kinerja Makro	2
Tabel 2.1. 1 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	5
Tabel 2.1. 2 Realisasi Belanja Urusan Pendidikan	5
Tabel 2.2. 1 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	11
Tabel 2.2. 2 Realisasi Belanja Urusan Kesehatan	12
Tabel 2.3. 1 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21
Tabel 2.3. 2 Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22
Tabel 2.4. 1 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat	26
Tabel 2.4. 2 Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat	26
Tabel 2.5. 1 Capaian Kinerja Urusan Trantibumlinmas	28
Tabel 2.5. 2 Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas	29
Tabel 2.6. 1 Capaian Kinerja Urusan Sosial	38
Tabel 2.6. 2 Realisasi Belanja Urusan Sosial	39
Tabel 4. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	46
Tabel 5. 1 Inovasi Daerah Kabupaten Gresik	53

BAB I

1. Capaian Kinerja Makro

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan menganut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini telah membawa perubahan yang fundamental terhadap kebijakan struktur dan manajemen pemerintahan yang mengarah kepada penguatan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan pemerintah daerah secara mandiri memberikan peningkatan pelayanan, peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai bentuk implementasi fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik telah merumuskan berbagai kebijakan strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah. Indikator utama dalam penyusunan kebijakan yang ada diarahkan pada upaya untuk optimalisasi dan pemanfaatan berbagai sumber daya (*resources*) yang dimiliki Kabupaten Gresik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kemampuan dan kebutuhan daerah. Selain itu juga memperhatikan kekhasan dan potensi unggulan yang ada.

1.1 Capaian Kinerja Makro

Tabel 1.1. 1 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,93	79,69	0,96
2	Angka Kemiskinan	142390	138550	-2,70
3	Angka Pengangguran	6,45	5,47	-15,19
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,79	4,91	2,51
5	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	188604.51	202004.47	7.11
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0.322	0.327	1,55

Sumber: Gresik Dalam Angka tahun 2025 (<https://gresikkab.bps.go.id>)

1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Posisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik pada tahun 2024 berada pada level 78,93 persen dan pada tahun 2025 sebesar 79,69 persen. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ini disebabkan adanya peningkatan di ketiga dimensi yang ada yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan dimensi standar layak yang diukur.

1.3 Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi Angka Kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2024 berada pada level 142390 sedangkan pada tahun 2025 sebesar 138550. Penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan karena pada tahun 2025 kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik mulai menggeliat setelah pandemi Covid-19 serta didukung dengan beragamnya program bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Gresik.

1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Angka Pengangguran Kabupaten Gresik mengalami penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi Angka Pengangguran Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mencapai level 6,45 dan pada tahun 2025 sebesar 5,47. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2025 terdapat penurunan pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik yang mengakibatkan menurunnya jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan termanfaatkannya pasokan tenaga kerja yang ada.

1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berdasarkan tabel diatas, ditarik kesimpulan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2024 berada pada level 4,79 persen dan pada tahun 2025 mencapai level 4,91 persen. Kenaikan kondisi perekonomian tersebut disebabkan oleh keberhasilan upaya pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19. Selain itu, konsumsi pemerintah terus memegang peranan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama pandemi berlangsung. Dengan demikian, upaya tersebut mampu

mendorong peningkatan pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi.

1.6 Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pertumbuhan Per Kapita Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir, pada tahun 2024 berada pada level 188.604.51 Ribu Rupiah, sedangkan pada tahun 2024 pada level 202.004.47 Ribu Rupiah. Salah satu faktor meningkatnya pendapatan per kapita Kabupaten Gresik adalah keberhasilan penanganan Covid-19. Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi sehingga pada tahun 2025 terjadi perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun penawaran (*supply*).

1.7 Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Gresik pada tahun 2024 berada pada level 0.322 persen, sedangkan pada tahun tahun 2025 berada pada level 0.327 persen. Adanya penurunan ketimpangan pendapatan mampu menjadi simulator dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik. Selain itu, dengan ketimpangan pendapatan yang terkendali mampu menambah keuntungan pengusaha dan menggalakkan investasi di Kabupaten Gresik sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.

BAB II Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Layanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja Urusan Pendidikan yang diperoleh Kabupaten Gresik berdasarkan Indikator Kinerja Kunci tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. 1 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	91,4769%
2.	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90.7666%
3.	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	27.8399 %
4.	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	43.0322 %
5.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	36.7470 %

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar Rp 197.771.627.062 dengan program/ kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 2.1. 2 Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
Urusan Pendidikan Kab. Gresik	233.202.574.300	197.771.627.062	84,81%
Program Pengelolaan Pendidikan			
1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22.168.653.966	21.847.281.778	98,55%

Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
Angka Partisipasi Sekolah			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	14.099.906.00	14.089.000.000	99,92%
Kekhususan PAUD			
1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.694.400.000	7.466.400.000	97,04%
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	287.630.966	206.001.460	71,62%
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	86.717.000	85.880.318	99,04%
2. Pengelolaan			
Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	52.726.207.566	45.066.926.609	85,47%
Angka Partisipasi Sekolah			
1. Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.455.086.347	1.446.956.187	99,44%
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	16.536.567.019	15.712.793.786	95,02%
3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	19.042.305.000	19.037.586.863	99,98%
Literasi			

Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	70.596.000	58.772.000	83,25%
Numerasi			
1. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	99.003.200	92.260.172	93,19%
Inklusifitas			
1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	15.522.650.000	8.718.557.600	56,17%
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	37.552.234.882	32.353.832.341	86,16%
Angka Partisipasi Sekolah			
1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.474.402.482	7.788.486.287	91,91%
2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	20.661.400.000	20.661.400.000	100%
3. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	206.080.400	166.934.819	81%
Literasi			
1. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk		20.776.900	64,52%

Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Numerasi			
1. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	85.500.000	84.150.000	98,42%
Inklusifitas			
1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.092.650.000	3.632.084.335	44,88%
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya			
Program Pengelolaan Pendidikan			
4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	59.293.841.886	40.840.090.614	68,88%
Angka Partisipasi Sekolah			
1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	39.407.702.000	39.376.090.000	99,92%
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19.850.721.286	1.428.759.193	7,20%
3. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	35.418.600	35.241.421	99,50%
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
5. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik	61.461.636.000	57.663.495.720	93,82%

Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Literasi			
1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	61.461.636.000	57.663.495.720	93,82%

C. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi pada pelaksanaan Urusan Pendidikan di Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar perhitungan jumlah penerima layanan;
- b) Analisis perhitungan kebutuhan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum sepenuhnya didukung oleh data yang memadai sebagai akibat dari keterbatasan waktu dan sumber daya manusia dalam menyesuaikan proses pengolahan data dengan siklus dan waktu penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda);
- c) Format isian tahapan penerapan SPM Bidang Pendidikan belum sepenuhnya selaras dengan capaian kinerja yang hendak dicapai serta terdapat ambiguitas dalam pemahaman dan pengisian format sehingga berpengaruh pada kualitas perencanaan dan pelaporan SPM;

- d) Capaian mutu layanan belum didukung oleh dasar perhitungan yang baku dan sesuai standar, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengukur ketercapaian indikator SPM Bidang Pendidikan sebagai *outcome* dari kegiatan yang dilaksanakan;

b. Solusi

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi sistem pendataan dan pengelolaan data pendidikan secara terintegrasi melalui pemutakhiran data berkala, peningkatan kualitas validasi dan verifikasi data, serta pengembangan basis data terpadu lintas sektor (*backbone*) sebagai dasar perhitungan jumlah penerima layanan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan;
- b) Penguatan proses perencanaan dan penganggaran berbasis data melalui sinkronisasi siklus pengumpulan dan pengolahan data dengan tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda), peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana, serta pengembangan mekanisme kerja terpadu internal organisasi (Dinas Pendidikan) guna memastikan ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar analisis perhitungan kebutuhan;
- c) Penyesuaian dan penyempurnaan format isian tahapan penerapan SPM Bidang Pendidikan melalui harmonisasi indikator kinerja dan kebutuhan pelaporan terkini, disertai penguatan pemahaman pelaksana melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyusunan pedoman teknis pengisian format, serta penguatan koordinasi dengan kementerian terkait guna mendorong pembaruan dan penyesuaian regulasi/ format sesuai dengan kebutuhan;
- d) Menyusun dan menerapkan metodologi perhitungan capaian mutu layanan yang baku dan terstandar, sehingga setiap sub

kegiatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan indikator *outcome* yang diukur. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis perhitungan capaian indikator, penguatan integrasi data sub kegiatan dengan indikator SPM, serta pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Dengan demikian, pengukuran capaian SPM tidak hanya berbasis realisasi kegiatan, tetapi juga berbasis hasil (*outcome*) yang terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja Urusan Kesehatan yang diperoleh Kabupaten Gresik berdasarkan Indikator Kinerja Kunci tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. 1 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase kematian ibu	0.0703 %
2.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	5.1866 %
3.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	91.5928 %
4.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	95.1100 %
5.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	95.2826 %
6.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88.6728 %
7.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	98.7951 %
8.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
10.	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %
11.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %
12.	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100 %
13.	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100 %
14.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	100 %

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar Rp 8,674,498,988 dengan program/ kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 2.2. 2 Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan
	URUSAN KESEHATAN KAB.GRESIK	9,484,436,233	8,674,498,988	91.46 %
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	9,484,436,233	8,674,498,988	91.46 %

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan
	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9,484,436,233	8,674,498,988	91.46 %
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	760,000,000	713,012,500	93.82 %
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	335,733,500	303,913,950	90.52 %
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	717,633,178	564,704,150	78.69 %
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	400,953,500	305,391,750	76.17 %
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	633,791,900	619,818,300	97.80 %
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	227,734,000	215,629,000	94.68 %

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	138,955,000	117,208,000	84.35 %
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25,000,000	19,276,368	77.11 %
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	2,527,256,530	2,246,660,950	88.90 %
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	25,000,000	23,412,920	93.65 %
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	3,013,278,500	2,923,727,900	97.03 %
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	679,100,125	621,743,200	91.55 %

C. Permasalahan

Beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi pada pelaksanaan Urusan Kesehatan di Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM adalah:

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Salah satu tantangan dalam pencapaian target indikator pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Gresik disebabkan oleh tingginya mobilitas ibu hamil, serta adanya ibu hamil yang tidak memiliki tempat tinggal tetap (*nomaden*) atau mengikuti suami/ keluarga dengan pekerjaan tidak tetap. Kondisi tersebut menjadi kendala tersendiri dalam proses pencatatan dan pelaporan SPM indikator pelayanan kesehatan ibu hamil.

Standar kuantitas indikator pelayanan kesehatan ibu hamil adalah minimal 6 (enam) kali kunjungan selama periode kehamilan (K6). Namun demikian, masih ditemukan K1 akses yang merupakan kontak pertama ibu hamil dengan petugas kesehatan yang tidak dilakukan pada trimester pertama (usia kehamilan ≤ 12 minggu), melainkan setelah usia kehamilan > 12 minggu. Keterlambatan kunjungan pertama (K1 ≥ 12 minggu) berdampak bagi ibu dan janin, antara lain terbatasnya informasi yang diperoleh ibu hamil mengenai perawatan kehamilan yang benar, tidak terdeteksinya secara dini pertumbuhan dan perkembangan janin serta kondisi kesehatan ibu, serta tidak teridentifikasinya tanda bahaya kehamilan sejak awal.

Tidak terdeteksinya tanda bahaya kehamilan sejak dini akibat keterlambatan akses K1 dapat meningkatkan risiko terjadinya abortus pada ibu hamil. Kejadian abortus pada kehamilan sebelum trimester ketiga menjadi salah satu tantangan dalam pencapaian target SPM indikator pelayanan kesehatan ibu hamil;

b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Salah satu tantangan dalam pencapaian target indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Gresik disebabkan oleh tingginya mobilitas ibu hamil serta masih adanya ibu bersalin yang berpindah tempat saat persalinan sehingga tidak dilaporkan. Selain itu, tidak terdeteksinya tanda bahaya kehamilan sejak dini akibat keterlambatan K1 akses dapat meningkatkan risiko terjadinya abortus pada ibu hamil. Kejadian abortus pada kehamilan di bawah trimester ketiga tersebut turut menjadi tantangan dalam pencapaian target SPM indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin. Di samping itu, adanya persalinan yang terjadi di luar wilayah Kabupaten Gresik dan tidak tercatat dalam sistem pelaporan juga mempengaruhi capaian kinerja SPM;

c) Pelayanan kesehatan balita

Tantangan dalam upaya pencapaian target SPM pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Gresik antara lain belum optimalnya kehadiran balita ke posyandu pada saat pelaksanaan SDDITK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) serta adanya penduduk musiman dengan tingkat mobilitas yang tinggi.

d) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Tantangan dalam upaya pencapaian target SPM pelayanan kesehatan usia produktif di Kabupaten Gresik antara lain sasaran usia produktif tidak berada di rumah pada saat dilakukan kunjungan karena bekerja atau bersekolah, serta masih adanya yang lupa terhadap jadwal pelayanan posyandu;

e) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Salah satu permasalahan dalam pelayanan kesehatan usia lanjut adalah masih rendahnya kunjungan lansia ke Puskesmas maupun Posbindu yang disebabkan karena ketidaktahuan atau lupa terhadap jadwal posyandu lansia;

f) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Salah satu permasalahan dalam pencapaian pelaporan pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelaporan masih terbatas pada fasilitas kesehatan milik pemerintah, yaitu RSUD dan Puskesmas;

g) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Salah satu tantangan dalam pencapaian SPM pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (ODGJ) ialah masih adanya anggapan tabu dan malu yang berkembang di masyarakat untuk memeriksakan kesehatan jiwanya di Puskesmas maupun di RS setempat;

h) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

Tantangan dalam pencapaian SPM pelayanan kesehatan orang terduga TB di Kabupaten Gresik ialah pelaporannya terbatas pada fasilitas kesehatan milik pemerintah (RSUD dan Puskesmas);

i) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Tantangan dalam pencapaian SPM pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) di Kabupaten Gresik ialah pelaporannya terbatas pada fasilitas kesehatan milik pemerintah (RSUD dan Puskesmas);

b. Solusi

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Untuk mengatasi tantangan dalam pencapaian SPM indikator pelayanan kesehatan pada ibu hamil dapat dilakukan dengan cara memberikan komunikasi,

informasi dan edukasi pada ibu hamil tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan (K6) dan bekerja sama dengan pihak swasta (klinik dan RS Swasta) terkait pelayanan kesehatan ibu hamil yang telah dilakukan. Selain itu juga dilakukan kemitraan dengan PKK dan kader desa untuk melaporkan ke Bidan Desa apabila terdapat warga yang hamil, memantau catin baik yang berKB atau yang tidak ber KB melalui edukasi tentang pentingnya ANC rutin, serta melakukan koordinasi lintas sektor guna mendorong integrasi dalam rangka pencapaian SPM;

b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Untuk mengatasi tantangan dalam pencapaian SPM indikator pelayanan kesehatan pada ibu bersalin dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait data yang digunakan serta melakukan promosi kesehatan dalam hal kesehatan ibu dan anak yang dimulai sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan;

c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Untuk mengatasi tantangan dalam pencapaian SPM indikator pelayanan kesehatan bayi baru lahir dapat dilakukan dengan cara memberikan komunikasi, informasi dan edukasi pada keluarga tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan (K4) dan bekerja sama dengan pihak swasta (klinik dan RS Swasta) terkait pelayanan kesehatan ibu hamil yang telah dilakukan. Selain itu juga dilakukan kemitraan dengan PKK dan kader desa untuk melaporkan ke Bidan Desa apabila terdapat warga yang melahirkan, memantau catin baik yang ber KB atau yang tidak ber KB terkait edukasi tentang pentingnya ANC rutin, serta melakukan koordinasi lintas sektor untuk koordinasi lebih lanjut dalam rangka pencapaian SPM;

d) Pelayanan kesehatan balita

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai target SPM pelayanan kesehatan balita yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan kelas balita dan bekerja sama lintas program untuk melakukan kunjungan rumah serta meningkatkan edukasi kepada orang tua bayi dan balita;

e) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk pencapaian pelayanan kesehatan usia produktif antara lain dengan melakukan kunjungan ke rumah sasaran dengan berkoordinasi bersama Bidan Desa maupun Perawat Desa untuk meningkatkan cakupan melalui pembuatan jadwal pelaksanaan Posbindu dan melakukan kunjungan rumah serta kunjungan sekolah;

f) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Adapun strategi yang dapat dilakukan antara lain melaksanakan *sweeping* serta melaksanakan kegiatan posyandu lansia ke desa dengan Prokes yang lebih baik, mengakumulasi data jumlah kunjungan lansia pada laporan Bidan Desa dan Perawat Desa serta meningkatkan promosi kesehatan khususnya dengan sasaran lansia dan keluarga. Selain itu juga dilakukan advokasi dengan Kepala Desa untuk memenuhi kebutuhan stik pemeriksaan (kolesterol, DM dan asam urat) dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD);

g) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Untuk meningkatkan pencapaian SPM pelayanan kesehatan antara lain dengan melakukan kerjasama dengan klinik dan RS Swasta untuk melaporkan pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang telah dilakukan;

h) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

Upaya mencapai target SPM pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bidan Desa maupun Perawat Desa agar segera melaporkan jika ditemukan pasien DM;

- i) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Adapun strategi pemecahan masalah dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ ialah melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan (deteksi dini) terhadap pasien ODGJ;

- j) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

Untuk meningkatkan capaian SPM pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis antara lain dengan melakukan kerjasama dengan klinik serta RS Swasta untuk melaporkan pelayanan kesehatan;

- k) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Untuk meningkatkan capaian SPM pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia antara lain dengan melakukan kerjasama dengan klinik dan juga RS Swasta untuk melaporkan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh Kabupaten Gresik berdasarkan Indikator Kinerja Kunci tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. 1 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/ kota	76.1497 %
2.	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	71.2218 %
3.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	94.3467 %
4.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	93.0354 %
5.	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	11.2805 %
6.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	-
7.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100 %
8.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100 %
9.	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	86.3309 %
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	5.4389 %

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar Rp

22.964.001.205,62 dengan program/ kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 2.3. 2 Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	URUSAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK	27,852,148,599	22,964,001,205	82.45%
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	18.073.824.100,5	13.924.792.056,28	77.04 %
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.252.897.482,90	1.231.319.681,65	98.28%
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	638.223.939,60	599.366.140,36	93.91%
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	16.182.702.678	12.094.106.234,27	74.73%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	9.778.324.499	9.039.209.149,34	92.44%
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	49.206.689	13.105.357	26.63%
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	8.634.170.000	8.018.152.945	92.87%
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	223.204.000	203.307.999	91.09%
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	178.812.110	178.804.900	99.99%
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	433.930.000	433.900.000	99.99%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	259.001.700	191.937.948,34	74.11%

C. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi pada pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

- Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal masih rendah sehingga penyedotan lumpur tinja belum menjadi prioritas masyarakat. Masyarakat hanya akan melakukan penyedotan apabila telah terjadi permasalahan;
- Usia armada penyedotan lumpur tinja sudah cukup tua sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yg cukup besar untuk meningkatkan kualitas layanan;
- Kondisi eksisting IPLT yang dibangun pada tahun 2014 membutuhkan *monitoring* dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengolahan lumpur tinja;
- Pelayanan sanitasi aman di seluruh wilayah kabupaten belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih terbatas pada 1 unit;
- Jumlah pengusaha sedot tinja swasta yang mengolah lumpur tinja di IPLT cenderung kecil;

- f) Pendataan pelanggan yang melakukan penyedotan melalui pengusaha sedot swasta pengelola lumpur tinja di IPLT belum dilakukan dengan baik;
- g) Proses penyaluran dana membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. Solusi

Upaya yang dapat dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi terkait peningkatan sanitasi aman melalui layanan lumpur tinja terjadwal dan pengenalan inovasi KAMPUNG PUDAK AYU (Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan melalui Penyedotan Lumpur Tinja untuk Dasawisma secara Kolektif, Aman, dan Kontinyu);
- b) Segera melakukan pemeliharaan armada untuk meningkatkan kualitas layanan;
- c) Melakukan penyusunan FS terkait peningkatan IPLT oleh Bappeda Gresik;
- d) Penyusunan *masterplan* pengelolaan air limbah domestik untuk menentukan sistem yang akan digunakan serta lokasi yang sesuai;
- e) Melakukan sosialisasi kepada pengusaha sedot swasta untuk melakukan pengolahan di IPLT;
- f) Melakukan sosialisasi kepada pengusaha sedot swasta yang mengolah lumpur tinja di IPLT untuk melakukan pendataan pelanggan dengan baik sebagai data dasar penghitungan sanitasi aman;
- g) Percepatan pekerjaan dengan menambah tenaga kerja untuk mencapai target pekerjaan.

4. Urusan Perumahan Rakyat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat yang diperoleh Kabupaten Gresik berdasarkan Indikator Kinerja Kunci tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. 1 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	92.3077 %
2.	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	291.4000 %
3.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	7.0517 %
4.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100 %

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar Rp 9.102.491.171 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 2.4. 2 Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. GRESIK	9.544.027.585	9.102.491.171	95.37%
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
1.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	60.155.000	48.614.437	80.82%
2.	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	228.872.585	77.876.734	34.03%
2.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA			
1.	Dana BNPB	9.255.000.000	8.976.000.000	96.99%

C. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perumahan Perumahan Rakyat di Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya ketersediaan basis data;
- Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi sehingga perencanaan dan penganggaran untuk rumah korban bencana di awal tahun tidak dilakukan pada pagu APBD;
- Beberapa penerima bantuan kesulitan menyiapkan data/dokumen administrasi sehingga pencairan dana mengalami keterlambatan;
- Kondisi cuaca ekstrem dan lokasi dampak bencana yang berada di kepulauan dan area perbukitan yang sulit dijangkau.

b. Solusi

Adapun langkah yang dapat dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan perencanaan kegiatan pada tahun 2025 untuk identifikasi dan pendataan guna melengkapi kekurangan data-data yang belum terakomodir pada tahun 2024;
- b) Mengajukan bantuan ke BNPB;
- c) Melakukan pendataan secara berkelanjutan menyesuaikan kondisi di lapangan;
- d) Melakukan koordinasi dengan BNPB terkait kendala yang dialami;
- e) Dilakukan pendampingan dan kerjasama dengan perangkat desa terkait kelengkapan dokumen administrasi.

5. Urusan Trantibumlinmas

A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja Urusan Trantibum Linmas yang diperoleh Kabupaten Gresik berdasarkan Indikator Kinerja Kunci tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. 1 Capaian Kinerja Urusan Trantibumlinmas

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100 %
2.	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100 %
3.	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100 %

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
5.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	90.7692 %

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas

Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar Rp 25.043.367.825 dengan program/ kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 2.5. 2 Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas

- Kategori pencapaian **Trantibumlinmas**

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)			
	1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,251,380,232	1,198,060,786	53.21%
2.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1,176,790,950	153,190,950	13.02%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
3.	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	579,630,800	573,740,776	98.98%
14.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	227,056,757	206,228,600	90.83%
15.	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	267,901,725	264,900,460	98.88%
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		2,377,476,750	2,278,009,322	95.82%
10.	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	655,256,350	578,399,541	88.27%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
11.	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,664,964,200	1,642,408,781	98.65%
12.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	57,256,200	57,201,000	99.90%
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				
5.	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	43,217,200	29,257,000	67.70 %

- Kategori pencapaian **Kebencanaan**

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
2.	Program Penanggulangan Bencana (KEBENCANAAN)	2,513,301,71	2,040,107,042	81.17 %
	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	235,026,500	211,292,070	89.90 %
	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	189,050,40	166,599,750	88.12 %
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	45,976,10	44,692,320	97.21 %
	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	993,315,900	869,775,672	87.56 %
6.	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	32,163,000	22,520,000	70.02 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
8.	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	103,332,80	92,874,661	89.88 %
9.	Penyusunan rencana kontijensi	140,370,400	137,414,1	97.89 %
10.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	74,202,90	53,243,800	71.75 %
11.	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	750,000	747,500	99.67 %
12.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	13,890,000	13,622,000	98.07 %
14.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	142,210,80	134,107,800	94.30 %
15.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	53,772,400	27,039,611	50.29
16.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	403,420,000	360,262,600	89.30
17.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	29,203,600	27,943,600	95.69 %
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		864,375,050	589,660,950	68.22 %
1.	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	2,880,000	2,880,000	100.00 %
2.	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	342,025,000	245,769,500	71.86 %
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	514,467,250	341,011,450	66.28 %
	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	3,000,000	0	0,00%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2,002,800	0	0,00%
	4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	420,584,260	369,378,350	87.83 %
	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	16,994,600	16,892,000	99.40 %
	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	37,444,700	24,590,000	65.67 %
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	366,144,960	327,896,350	89.55 %

- Kategori pencapaian **Pemadam Kebakaran**

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	2,397,114,302	1,133,933,675	47.30%
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,075,545,65	1,009,838,675	48.65%
1.	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	19,015,200	3,680,000	19.35%
2.	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	311,522,000	218,586,265	70.17%
5.	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	251,046,799	211,074,110	84.08%
6.	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	132,231,200	23,747,500	17.96 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
7.	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	140,785,640	0	0,00%
14.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1,128,884,812	550,590,800	48.77%
15.	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	92,060,000	2,160,000	2.35 %
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		27,516,600	23,358,000	84.89%
1.	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	4,066,300	962,000	23.66%
2.	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	23,450,300	22,396,000	95.50%
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		150,376,300	99,777,000	66.35%
1.	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	57,911,800	47,982,500	82.85%
2.	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	92,464,500	51,794,500	56.02%
5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		143,675,751	960,000	0.67%
1.	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	32,492,000	960,000	2.95%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
4.	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	111,183,751	0	0.00%

C. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perumahan Perumahan Rakyat di Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Kategori pencapaian **Trantibumlinmas**
 - a) Tidak adanya QR code pada reklame/ iklan;
 - b) PKL yang sebelumnya telah ditertibkan tetap kembali lagi pada keesokan harinya;
 - c) Tempat yang disediakan untuk menampung tangkapan yang telah dilakukan luasnya terbatas;
- Kategori Capaian **Kebencanaan**
 - a) Minimnya personil yang menguasai teknologi informasi dan Geografis Information System (GIS);
 - b) Terbatasnya tenaga yang memiliki berkualifikasi khusus *Damage and Loss Assessment* (DALA) untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - c) Gudang penyimpanan logistik dan peralatan belum memadai;
 - d) Kurangnya Komunikasi antar instansi/ dinas dan lembaga lain dalam hal pencapaian SPM;
 - e) Terbatasnya alokasi anggaran;

- Kategori Capaian **Kebakaran**

a) Kesenjangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Analisis beban kerja menunjukkan adanya defisit personel yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal berdasarkan rasio populasi dan luas wilayah pelayanan. Selain itu, tingkat kualifikasi kompetensi spesialis bagi personel lapangan masih berada pada tahap pengembangan;

b) Amortisasi dan Keterbatasan Sarana Kritis

Sebagian armada kendaraan operasional telah melampaui usia teknis ideal, sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi. Kesenjangan juga terdeteksi pada ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) standar bagi petugas serta belum tersedianya jaringan hidran perkotaan yang fungsional secara menyeluruh;

c) Disparitas Jangkauan Pelayanan Spasial

Masalah geografis wilayah kepulauan dan perbatasan menciptakan titik buta pelayanan (*blank spot*) di mana kehadiran fisik pos permanen masih dalam tahap perencanaan, sehingga waktu tanggap di wilayah tersebut masih menghadapi tantangan aksesibilitas;

d) Asimetri Validitas Data Pelaporan

Terdapat selisih informasi antara pelaporan administratif dengan dinamika risiko di lapangan yang memerlukan penguatan sistem integrasi data secara *real-time* guna mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko;

b. Solusi

Upaya yang dapat dilakukan atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Trantibum Linmas Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- Kategori pencapaian **Trantibumlinmas**

- a) Penambahan QR code pada reklame/ iklan untuk memudahkan anggota dalam melakukan penertiban;
- b) Penyediaan kawasan yang dikhususkan untuk relokasi PKL;
- c) Penambahan alokasi anggaran yang dikhususkan untuk perluasan penampungan serta biaya makan dan minum bagi tangkapan;

- Kategori Capaian **Kebencanaan**

- a) Penambahan personil melalui seleksi CPNS yang disesuaikan dengan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- b) Mengajukan anggaran ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Jatim maupun ke pusat Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- c) Melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan *stakeholder* terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d) Diperlukan penambahan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan skala prioritas;

- Kategori Capaian **Kebakaran**

- a) Reformasi Perencanaan dan Pengembangan SDM
Mengalihkan orientasi kinerja menuju hasil yang lebih sensitif terhadap resiliensi daerah serta menyusun peta jalan rekrutmen dan pelatihan kompetensi secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran;
- b) Advokasi Investasi Sarana Prasarana
Mendorong prioritas kebijakan penganggaran bagi pembangunan pos pemadam baru di wilayah strategis serta melakukan peremajaan armada secara periodik guna menjamin keandalan operasional dalam situasi darurat;
- c) Optimalisasi Sumber Pembiayaan Alternatif
Menggali potensi dukungan melalui skema *Corporate*

Social Responsibility (CSR) serta pemanfaatan dana pembangunan di tingkat lingkungan guna mempercepat pemenuhan peralatan keselamatan publik;

d) Penguatan Tata Kelola Berbasis Teknologi

Mengintegrasikan sistem pelaporan operasional ke dalam *platform* digital guna meningkatkan validitas data kinerja serta memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi bencana secara mandiri.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja Urusan Sosial yang diperoleh Kabupaten Gresik berdasarkan Indikator Kinerja Kunci tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. 1 Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	47.1024 %
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
5.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100 %
6.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	8.7819 %

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar Rp 4.511.868.863 dengan program/ kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 2.6. 2 Realisasi Belanja Urusan Sosial

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	URUSAN SOSIAL KAB.GRESIK	4.880.449.050	4.511.868.863	92,45 %
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.723.071.450	4.378.7563.004	92,71 %
3.	Penyediaan alat bantu	190.173.500	97.926.000	51,49 %
5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	4,313,882,178	4,069,127,96	94.33%
6.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	27,655,450	24,197,950	87,50 %
8.	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	17,112,000	16,223,400	94,81 %
10.	Pemberian layanan kedaruratan	85,616,795	85,388,790	99,73 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	12. Pemberian layanan rujukan	88,631,527	85,698,900	96,69 %
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	157,377,600	133,305,859	84.70 %
	1. Penyediaan makanan	95,540,400	86,960,859	51,91 %
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	40,900,000	25,800,000	63,06 %
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	20,937,200	20,545,000	98,13 %

C. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Sosial di Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Sosial di Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat kode rekening yang tidak tertagging di aplikasi sehingga harus menggunakan kode rekening lain untuk menghindari angka nol, seperti pada kegiatan pemberian layanan rujukan (d) dan pemberian bimbingan fisik dan mental (d);
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sehingga menyebabkan penanganan PPKS, khususnya penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) kurang optimal;

- c) Terdapat bantuan sosial yang tidak tersalurkan dikarenakan penerima manfaat meninggal dan pindah tanpa keterangan (di luar kendali Dinas Sosial);
- d) Terdapat beberapa sub kegiatan pendukung yang tidak mendapatkan alokasi anggaran akibat keterbatasan anggaran;

b. Solusi

Upaya yang dapat dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Penambahan opsi "*ketik/ typing*" pada penulisan kode rekening;
- b) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk percepatan penanganan PPKS;
- c) Melaksanakan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat;
- d) Menyusun Rencana Aksi SPM agar sub kegiatan pendukung SPM mendapatkan alokasi anggaran dari Tim Anggaran Kabupaten mengingat SPM merupakan program prioritas.

BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

A. HASIL EPPD Tahun Sebelumnya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka penilaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2024, Kabupaten Gresik memperoleh skor dan status kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3,4093 dengan kategori Sedang.

B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

1. Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan

memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gresik belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pendapatan PBB P2 yang datanya belum *update*, potensi Pendapatan Pajak Restoran atas SPTPD yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, potensi pendapatan PBJT Jasa Hiburan dan Kesenian panti pijat, pijat refleksi, mandi uap/ spa serta PBJT Tenaga Listrik karena tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; serta kekurangan penerimaan atas pendapatan BPHTB yang kurang ditetapkan sebesar **Rp 102.832.000,00**.
- b. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gresik belum memadai yang mengakibatkan informasi KIB sebagai dasar pengelolaan BMD yang tidak akurat berisiko tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya; pengguna Laporan

BMD tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait aset daerah; penyajian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap.

BAB IV RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Kerangka anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2025 memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gresik. Pendanaan anggaran pembangunan daerah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pendanaan lain-lain.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 *unaudited*. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total anggaran pada APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar Rp 1.475.313.412.879,28 sedangkan untuk Belanja Daerah sebesar Rp 2.411.809.366.852,63. Secara rinci Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No.		Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1		2		3	4	5	6
1		PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3		Pajak Daerah	5.1.1.1.1	1,098,185,912,376.00	1,045,830,755,273.77	95.23	960,468,393,710.00
4		Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	376,244,423,322.50	322,646,468,457.00	85.75	401,465,003,530.69
5		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	12,645,000,000.00	12,053,225,530.70	95.32	12,267,234,269.30
6		Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	81,013,819,933.58	94,782,963,617.81	117.00	10,828,053,090.77
7		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	1,568,089,155,632.08	1,475,313,412,879.28	94.08	1,385,028,684,600.76
8		PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1				
10		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1	288,540,736,000.00	328,989,206,500.00	114.02	252,458,013,000.00
11		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1	1,006,890,095,703.00	1,000,742,372,252.00	99.39	976,604,015,000.00

No.		Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1		2		3	4	5	6
12		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1	109,254,038,000.00	92,058,376,986.00	84.26	98,720,516,184.00
13		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1	395,999,117,254.00	394,978,514,976.00	99.74	353,934,571,941.00
14		Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1,800,683,986,957.00	1,816,768,470,714.00	100.89	1,681,717,116,125.00
15		Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
16		Dana Desa	5.1.1.2.2	316,480,417,000.00	315,970,754,200.00	99.84	321,507,175,000.00
17		Insentif Fiskal	5.1.1.2.2	22,200,037,000.00	22,200,037,000.00	100.00	36,385,778,000.00
18		Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	338,680,454,000.00	338,170,791,200.00	99.85	357,892,953,000.00
19		Pendapatan Transfer Antar daerah	5.1.1.2.3				
20		Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3	140,795,170,000.00	162,926,131,550.00	115.72	289,414,392,200.00
21		Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3	15,541,277,000.00	15,541,277,000.00	100.00	16,180,867,000.00

No.		Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1		2		3	4	5	6
22		Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3	156,336,447,000.00	178,467,408,550.00	114.16	305,595,259,200.00
23		Jumlah Pendapatan Transfer	5.1.1.2	2,295,700,887,957.00	2,333,406,670,464.00	101.64	2,345,205,328,325.00
24		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
25		Pendapatan Hibah	5.1.1.3	0.00	64,875,000.00	0.00	186,000,000.00
26		Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.1.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00
27		Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.1.1.3	0.00	64,875,000.00	0.00	186,000,000.00
28		JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	3,863,790,043,589.08	3,808,784,958,343.28	98.58	3,730,420,012,925.76
29		BELANJA DAERAH	5.1.2				
30		BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
31		Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1,243,218,642,996.52	1,178,154,662,397.98	94.77	1,085,548,797,241.45

No.		Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1		2		3	4	5	6
32		Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1,152,962,238,635.82	1,000,044,599,636.19	86.74	1,010,692,655,425.09
33		Belanja Bunga	5.1.2.1.3	720,052,083.63	701,822,916.49	97.47	964,120,370.60
34		Belanja Hibah	5.1.2.1.4	268,525,152,800.00	220,697,040,401.97	82.19	382,505,675,850.32
35		Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	13,982,304,500.00	12,211,241,500.00	87.33	15,651,445,000.00
36		Jumlah Belanja Operasi	5.1.2.1	2,679,408,391,015.97	2,411,809,366,852.63	90.01	2,495,362,693,887.46
37		BELANJA MODAL	5.1.2.2				
38		Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	61,742,872,000.00	9,091,558,797.00	14.72	1,727,306,005.00
39		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	98,601,202,458.53	72,316,878,023.54	73.34	86,126,274,741.00
40		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	122,857,341,580.90	108,317,193,228.72	88.17	118,169,885,080.81
41		Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	173,222,045,069.60	82,400,847,058.42	47.57	208,508,996,188.58
42		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	12,337,940,671.00	12,003,523,721.00	97.29	8,617,485,563.00
43		Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0.00	0.00	0.00	1,312,000,000.00
44		Jumlah Belanja Modal	5.1.2.2	468,761,401,780.03	284,130,000,828.68	60.61	424,461,947,578.39

No.		Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1		2		3	4	5	6
45		BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
46		Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	23,690,964,990.95	744,544,649.00	3.14	2,026,255,613.38
47		Jumlah Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	23,690,964,990.95	744,544,649.00	3.14	2,026,255,613.38
48		BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
49		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1	109,818,591,237.60	104,941,535,973.00	95.56	99,090,915,050.00
50		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.2	13,233,844,670.06	7,377,046,169.00	55.74	16,322,812,800.00
51		Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.3	650,948,746,621.47	636,784,469,200.00	97.82	660,311,350,000.00

No.		Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1		2		3	4	5	6
52		Jumlah Belanja Transfer	5.1.2.4	774,001,182,529.13	749,103,051,342.00	96.78	775,725,077,850.00
53		JUMLAH BELANJA DAERAH	5.1.2	3,945,861,940,316.08	3,445,786,963,672.31	87.33	3,697,575,974,929.23
54		SURPLUS / DEFISIT	5.1.3	(82,071,896,727.00)	362,997,994,670.97	542.29	32,844,037,996.53
55		PEMBIAYAAN	5.1.4				
56		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
57		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1	89,071,896,727.00	89,071,896,727.00	100.00	76,370,858,730.47
58		Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	0.00	0.00
59		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
60		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.1.4.1	104,071,896,727.00	104,071,896,727.00	100.00	76,377,858,730.47
61		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
62		Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2	7,000,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00

No.		Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1		2		3	4	5	6
63		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	0.00	20,000,000,000.00
64		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.1.4.2	22,000,000,000.00	15,000,000,000.00	0.00	20,150,000,000.00
65		PEMBIAYAAN NETTO	5.1.4	82,071,896,727.00	89,071,896,727.00	108.53	56,227,858,730.47
66		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.5	0.00	452,069,891,397.97		89,071,896,727.00

Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah mencapai Rp 64,875,000.00 serta transfer dari Pemerintah Pusat mencapai Rp 1,800,683,986,957.00. Jika dilihat dari komposisi anggaranya, terlihat bahwa transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 101,64 % dari total realisasi pendapatan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terbesar 94,08% dan Pendapatan Transfer sebesar 100%.

Capaian realisasi belanja pada tahun 2025 sebesar Rp 3.445.786.963.672,31 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu Belanja Operasi sebesar 90,01%, Belanja Modal sebesar 60,61%, Belanja Tidak Terduga sebesar 3,14% dan Belanja Transfer sebesar 96,78%. Berdasarkan 4 (empat) komponen tersebut Belanja Transfer memiliki capaian realisasi terbesar yaitu Rp 749,103,051,342.00 (96,78%) sedangkan komponen belanja dengan capaian realisasi terendah yaitu Belanja Tidak terduga sebesar Rp 744,544,649.00 (3,14%).

BAB V INOVASI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, telah menginventarisasi dan menghimpun inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Indikator dan parameter-parameter yang telah ditetapkan. Pada pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2025, Kabupaten Gresik memperoleh skor IID sebesar 57,98 dengan kategori Inovatif dan menempati peringkat ke-119 dari 415 Kabupaten se-Indonesia. Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan baik dari sisi skor IDD ataupun peringkat secara nasional, dimana pada tahun 2024 skor IDD Kabupaten Gresik sebesar 54,43 yang berada pada urutan ke 128, berdasarkan pada database terakhir ke Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2024, inovasi yang telah dilaksanakan antara lain:

Tabel 5. 1 Inovasi Daerah Kabupaten Gresik

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Podcast "Ngopi Sik (Ngobrol Inspiratif Soal Kebangsaan dan Politik)"	Penerapan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
2	SEKRETARIAT DPRD	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Setwan One Gate System (SOGS)	Penerapan	Keuangan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Aggregate Sistem Informasi Desa (SID)	Penerapan	Komunikasi dan Informatika
4	KECAMATAN DRIYOREJO	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	KANG RAMLI (Kampung Ramah Lingkungan)	Penerapan	Lingkungan Hidup
5	DINAS PENDIDIKAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	HTM (Hatiku Padamu)	Penerapan	Pendidikan
6	DINAS PERHUBUNGAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	NGOPI BARENG (PENGAWASAN, POTENSI, PENAGIHAN DAN KEBERSAMAAN) DALAM	Penerapan	Perhubungan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
				PENATAAN PARKIR DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK		
7	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	REKATURA (Rekomendasi dan Pemetaan Infrastruktur Tangguh Bencana)	Penerapan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
8	UPT PUSKESMAS GENDING GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	SI GENID IVA (Siap GERakkan Ibu Dengan IVA)	Penerapan	Kesehatan
9	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	KADES (KAWAL DESA)	Penerapan	Perencanaan
10	UPT PUSKESMAS INDUSTRI	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	CANTIK JELITA	Penerapan	Kesehatan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Zona merah (larangan) Bagi PKL berjualan di Trotoar	Penerapan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
12	UPT SMPN 18 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Ngopi Basuki (Ngobrol Pintar Bareng Seputar Edukasi)	Penerapan	Pendidikan
13	KECAMATAN MANYAR	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Digital	SIBOLA (Sistem Informasi Barcode Online Layanan Administrasi)	Penerapan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		kewenangan Daerah				
14	KECAMATAN BENJENG	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	GORENG CEKATAN (Gobyos Bareng dan Cek Kesehatan)	Penerapan	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15	UPT SMPN 30 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	E-Libga Public Go	Penerapan	Pendidikan
16	UPT SMPN 27 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan	Non Digital	Belajar Dengan Tabel Kapas	Penerapan	Pendidikan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah				
17	UPT SMPN 31 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	SINCAN GR16	Penerapan	Lingkungan Hidup
18	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	PEMBAYARAN ONLINE (DYTA) RETRIBUSI RUSUNAWA	Penerapan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	Kelurahan Kemuteran	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan	Non Digital	"WALI SOMAD BERSERBAN" Warung Balita Sehat: Optimalisasi	Penerapan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		Dana Berbasis Enterpreneur dari sharing bantuan CSR		
20	KECAMATAN GRESIK	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	PELAYANAN MENYAPA SENJA	Penerapan	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
21	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	FLASHDISK (Fokus Langkah Spesifik Mencegah Dispensasi Kawin)	Penerapan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Digital	ForPeKa Gresik 3.0	Penerapan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		kewenangan Daerah				
23	PUSKESWAN PANCENG	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Si Jempol Penak (Sistem Jemput Bola Pelayanan Ternak)	Penerapan	Pertanian
24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	PAKADES Gresik (Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa) Kabupaten Gresik	Penerapan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Interns Collaborative Design Squad (ICDS)	Penerapan	Pariwisata

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
	DAN OLAHRAGA					
26	DINAS PERTANIAN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Manis Manja (Minuman Instan Markisa Gula Jawa)	Penerapan	Pertanian
27	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SIP DINDA (Safari Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Penerapan	Penanaman Modal
28	DINAS SOSIAL	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital	SI DUMI BELAJAR (Aksi Edukasi Mitigasi Bencana untuk Siswa Sekolah Dasar)	Penerapan	Sosial

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		kewenangan Daerah				
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Inovasi pelayanan publik	Digital	NGOPI (Ngobrol Perihal Investasi)	Penerapan	Penanaman Modal
30	DINAS PERTANIAN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	SIPOLTAK (Asistensi Pojok Online Lalu Lintas Ternak dan Produknya)	Penerapan	Pertanian
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Inovasi pelayanan publik	Digital	SiNOPEL (Notifikasi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Berbasis WhatsApp Gateway)	Penerapan	Penanaman Modal

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	AQUDIG (Aquarium Digital)	Penerapan	Perpustakaan
33	KECAMATAN PANCENG	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	HARLAH SEBANKSAH (HARUS SEKOLAH DARI SEDEKAH BANK SAMPAH)	Penerapan	Sosial
34	DINAS TENAGA KERJA	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ReDinaker	Penerapan	Tenaga Kerja
35	UPT PUSKESMAS KEDAMEAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	GIGI't SEKAT (GIGI SEHAT ANAK SEKOLAH)	Penerapan	Kesehatan
36	UPT PUSKESMAS	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang	Non Digital	HEALING TIPIS	Penerapan	Kesehatan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		menjadi kewenangan Daerah				
37	UPT PUSKESMAS KESAMBEN KULON	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	AKADEMIA	Penerapan	Kesehatan
38	UPT PUSKESMAS KEBOMAS	Inovasi pelayanan publik	Digital	SI RAMAH (SOLUSI RAKYAT AWASI DARI RUMAH)	Penerapan	Kesehatan
39	UPT PUSKESMAS DAPET	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	CANTING EMAS	Penerapan	Kesehatan
40	UPT PUSKESMAS ALON-ALON	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	MACAN DIVA (MAMA CANTIK SADAR IVA)	Penerapan	Kesehatan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
41	UPT PUSKESMAS WRINGINANOM	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	POS GENTING SI	Penerapan	Kesehatan
42	UPT PUSKESMAS MENTARAS	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	KURMA LARIS (KUNJUNGAN RUMAH LANSIA RISIKO TINGGI)	Penerapan	Kesehatan
43	UPT PUSKESMAS CERME	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	MASDUDA RINDU BERAT (Masyarakat Dukung Periksa Dahak, Respek Informasi dan Edukasi Berantas TBC)	Penerapan	Kesehatan
44	UPT PUSKESMAS METATU	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	HOME CARE MANTAP'S	Penerapan	Kesehatan
45	UPT PUSKESMAS DUKUN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	GREBEK WARUNG SATE	Penerapan	Kesehatan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
46	UPT PUSKESMAS PANCENG	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	GESER SI DIA	Penerapan	Kesehatan
47	UPT PUSKESMAS BENJENG	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Jus Ciamik	Penerapan	Kesehatan
48	UPT PUSKESMAS KEPATIHAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	INOVASI PERUT BESAR (Pemeriksaan Kesehatan Rutin Tiap Bulan Di Pasar)	Penerapan	Kesehatan
49	RSUD Gresik Sehati	Inovasi pelayanan publik	Digital	KLIK SEHATI (Konsultasi Interaktif Kesehatan di RSUD Gresik Sehati)	Penerapan	Kesehatan
50	RSUD Ibnu Sina	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Startup petir (Usaha rintisan untuk penderita TB Resisten Obat)	Penerapan	Kesehatan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
51	DINAS KESEHATAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SINAU BUK!	Penerapan	Kesehatan
52	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Inovasi pelayanan publik	Digital	Transaksi Non Tunai Layanan Air Limbah Domestik (SI ONTA ASIK)	Penerapan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
53	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Inovasi pelayanan publik	Digital	SIPATU (Sistem Informasi Pariwisata Terpadu)	Penerapan	Pariwisata
54	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SATGAS JAGA Gresik (Jaringan Arek Gresik Anti Narkoba)	Penerapan	Kepemudaan dan Olahraga
55	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	PUDAK GRESIK (Pusat Data Kebudayaan Gresik)	Penerapan	Kebudayaan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
	DAN OLAHRAGA					
56	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	TAK OPENI (Tata Kelola Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)	Penerapan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
57	KECAMATAN KEDAMEAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SEHAT PAK (Senam, Cek Kesehatan dan Pembayaran Pajak)	Penerapan	Sosial
58	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	MOVE - ON (Monitoring Evaluasi Online)	Penerapan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
59	DINAS SOSIAL	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	SALAMAN Eks ODGJ (Sehatkan dan Latih sampai Mandiri Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa)	Penerapan	Sosial
60	KECAMATAN BALONGPANG GANG	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	JEMPUT BOLA PBB (JEMBO PINTER)	Penerapan	Keuangan
61	DINAS SOSIAL	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	LK3 Goes to School (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Goes to School)	Penerapan	Sosial
62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Inovasi pelayanan publik	Digital	Pak Dalang Kepasar (Pelayanan Administrasi Kependudukan Datang Langsung Pada	Penerapan	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
				Masyarakat Rentan)		
63	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	BIMA MONCER (Bina Marga Monitoring Jalan Cerdas)	Penerapan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
64	DINAS PERIKANAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	BANDREAM (BANDENG ICE CREAM)	Penerapan	Kelautan dan Perikanan
65	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Integrasi Aplikasi SI- PANTAS dengan aplikasi E-Kinerja BKN melalui API	Penerapan	Kepegawaian
66	KECAMATAN DUKUN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	NGOPI CERDAS (Ngobrol Produktif Inspiratif dan Ceria Bareng Masyarakat)	Penerapan	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
67	UPT PUSKESMAS DADAP KUNING	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SIS KB LING (SISTEM KB KELILING)	Penerapan	Kesehatan
68	UPT PUSKESMAS TAMBAK	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SIPETIS (SKRINING PENDERITA TUBERCULOSIS)	Penerapan	Kesehatan
69	UPT PUSKESMAS BUNGAH	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	KLUNTING (KELAS IBU HAMIL UNTUK CEGAH STUNTING)	Penerapan	Kesehatan
70	UPT SMPN 32 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	KOPI SEDUH (Kultum Oleh Peserta Didik Setelah Sholat Dhuhur)	Penerapan	Pendidikan
71	UPT PUSKESMAS KARANGANDONG	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan	Non Digital	BESTI KITA BUCIN REK {Bebaskan stunting dg kelas ibu balita,ibu hamil,catin Resti dan KEK}	Penerapan	Kesehatan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		han yang menjadi kewenangan Daerah				
72	UPT PUSKESMAS SUKOMULYO GRESIK	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SATGAS PASMENZO	Penerapan	Kesehatan
73	UPT PUSKESMAS NELAYAN	Inovasi pelayanan publik	Digital	DAHSYAT	Penerapan	Kesehatan
74	UPT PUSKESMAS SLEMPIT	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	KETAWA (KEPATUHAN TERAPI OBAT VIA WHATSAPP)	Penerapan	Kesehatan
75	UPT PUSKESMAS SEMBAYAT	Inovasi pelayanan publik	Digital	SATRIA CATIN	Penerapan	Kesehatan
76	UPT SMPN 29 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan	Digital	DESA PETAL (Dedikasi Siswa melalui Pena Digital)	Penerapan	Pendidikan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah				
77	UPT SMPN 24 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	TERCIDUG MANTAN (Literasi Cerdas Digital Berkarakter Mandiri dan Berpengetahuan)	Penerapan	Pendidikan
78	UPT SMPN 23 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	KULTUM GAMSI (Gerakan Akhlak Mulia Setiap Hari)	Inisiatif	Pendidikan
79	UPT SMPN 22 GRESIK	Inovasi pelayanan publik	Digital	SIPANDAI (Sistem Pantau Dan Informasi)	Penerapan	Pendidikan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
80	UPT SMPN 20 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	PUDAKA	Inisiatif	Pendidikan
81	UPT SMPN 11 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Go_Spens (Go SPENSEGRES) sebagai Solusi Aman dan Inovatif Antar-jemput Siswa di UPT SMPN 11 Gresik	Penerapan	Pendidikan
82	UPT SMPN 10 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Digital	eKSIS (Edukasi Karakter Siswa Spenio)	Penerapan	Pendidikan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		kewenangan Daerah				
83	UPT SMPN 3 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	GERCAP SI JARI BERBINAR: Jelajah Ilmu, Cerahkan Masa Depan	Penerapan	Pendidikan
84	UPT SMPN 1 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	SIGEMBULL dalam SIBESTIE	Penerapan	Pendidikan
85	UPT SMPN 5 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan	Digital	Green Robotic Otomatic Watering (GROW)	Uji Coba	Pendidikan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		han yang menjadi kewenang an Daerah				
86	UPT SMPN 28 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenang an Daerah	Digital	SMARTCODE (Sumber Materi Ajar, Referensi dan Teks dalam BarCODE)	Inisiatif	Pendidikan
87	UPT SMPN 34 GRESIK	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	GELIAN (GERAKAN LITERASI HARIAN)	Inisiatif	Pendidikan
88	UPT SMPN 6 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenang an Daerah	Non Digital	GRASI SILYA "Gerakan Literasi Numerasi Menghasilkan Karya"	Inisiatif	Pendidikan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
89	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	GAPURA (Gerbang Pengembangan Kompetensi Menuju SMART ASN) E-Learning	Penerapan	Kepegawaian
90	KECAMATAN WRINGINANOM	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	PUTER JAM (PELAYANAN UMUM TERPADU JUM'AT MALAM)	Penerapan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
91	KECAMATAN SANGKAPURA	Inovasi pelayanan publik	Digital	PPKM DIGITAL KECAMATAN SANGKAPURA	Penerapan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
92	KECAMATAN TAMBAK	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	CARI DI DESA (Camat satu hari DI DESA)	Penerapan	Sosial
93	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	PENDILWESI (PENDIDIKAN, LINGKUNGAN, WISATA EKONOMI TERINTEGRASI DI KECAMATAN UJUNG PANGKAH)	Penerapan	Pendidikan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
94	Kelurahan Kebungson	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Heritage Kampung Lawas Kebungson	Penerapan	Pariwisata
95	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	e-BK (Bantuan Keuangan Elektronik)	Penerapan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
96	Kelurahan Kebomas	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital	GEMAR BERKEBUN POKCOY MENUJU MANDIRI PANGAN DI KELURAHAN KEBOMAS (GEMPUR PANGAN MAS)	Penerapan	Lingkungan Hidup

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		kewenangan Daerah				
97	Kelurahan Sidomoro	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	GERAKAN SIDOMORO PILIH DAN OLAH SAMPAH (SIDOPOLAH)	Penerapan	Lingkungan Hidup
98	KECAMATAN KEBOMAS	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Kebomas Digital Ahli Waris Sistem (MAS DARIS)	Penerapan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
99	SEKRETARIAT DAERAH	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan	Digital	ngobrol sEputar pengadaan barang dan jasa GResik solutif reSponSif dan	Penerapan	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		Efektif (LENSA GRISSE)		perundang-undangan
100	KECAMATAN BUNGAH	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Layanan Responsif Jemput Bola Keliling (Layar Poin)	Penerapan	Keuangan
101	KECAMATAN SIDAYU	Inovasi pelayanan publik	Digital	SI PUSKOINDES (Sistem Pusat Konsultasi dan Informasi Desa)	Penerapan	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
102	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Digital	SEPADAN	Penerapan	Keuangan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		kewenangan Daerah				
103	INSPEKTORAT	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	GALERI APIP	Penerapan	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
104	SEKRETARIAT DAERAH	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Chatbot pada Website www.jdih.gresikab.go.id untuk Pendayagunaan Informasi Produk Hukum di Kabupaten Gresik	Penerapan	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
105	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital	GKMS (Gresik Kawasan Merdeka Sampah)	Penerapan	Lingkungan Hidup

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
		kewenang an Daerah				
106	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenang an Daerah	Digital	Sistem Elektronik Pelayanan Kelitbangan dan iNovasi Daerah (SEPEKAN) (2025)	Penerapan	Penelitian dan Pengembang an
107	KECAMATAN CERME	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenang an Daerah	Non Digital	JAMU PENAK MAS (Jam Untuk Pendidikan Anak dan Masyarakat)	Penerapan	Pendidikan
108	KECAMATAN MENGANTI	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	LOLIPOP (Layanan Online Poling PBB dan Obyek Pajak)	Penerapan	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Urusan
109	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	KUDAKU TENAR (Aku Datang Alat Ukur Tepat dan Benar)	Penerapan	Perdagangan
110	UPT SMPN 2 GRESIK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	KEBAS SOLUSI CERDAS ATASI SAMPAH KERTAS	Penerapan	Lingkungan Hidup
111	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Lontar Cerry (Layanan Online Tata Ruang dengan Cepat,Efektif dan Terintegrasi)	Penerapan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang